



RENCANA KERJA
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA MALUKU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Berkenan dengan harapan kita untuk menjadikan instansi pemerintah yang Akuntabel, Efisien, Responsive dan Transparansi guna memelihara kepercayaan masyarakat kepadapemerintah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan limpahan Berkah dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan Negara khususnya Daerah Maluku tercinta ini.

Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 ini merupakan gambaran rencana kerja yang komprehensif terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam Tahun Anggaran 2021.

Semoga Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja ke depan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Baik dari aspek perencanaan maupun pengorganisasian.

Ambon, 2020
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA MALUKU



Drs. A. H. MUHAMAD, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19650709 199203 1 015



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	3
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018, 2019 dan Capaian	
2.2 Renstra SKPD	3
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021	18
BAB IV PENUTUP	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) unit kerja tahun 2021 harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi/unit kerja dan memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Unit Kerja tahun lalu serta tujuan, sasaran, program/kegiatan tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku menyampaikan Renja Biro Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku adalah

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

2. Tujuan

Untuk mengetahui Rencana Kerja (Renja) yang dijabarkan dalam program kerja sesuai pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Sasaran dan Program kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Setda Maluku Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Merupakan penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta Sistematika Renja Tahun 2021.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-3) dan (tahun n-2). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Strategis Biro, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Program dan Kegiatan.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Merupakan tujuan, sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menguraikan secara singkat mengenai penegasan kembali penyusunan Renja SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021, serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 (tahun n-3) Dan Capaian Renstra SKPD

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Alokasi anggaran belanja langsung pada Biro Kesejahteraan rakyat untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.14.004.782.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.687.104.902,- (90,4 %) dan sisa anggaran sebesar Rp.1.319.627.098,-. Anggaran belanja ini direalisasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa layanan dan sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor serta peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.14.952.000,- dengan realisasi keuangan Rp.8.152.752,- atau 54,5% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.6.799.248,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa 1 saluran komunikasi (Indiehome)

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.106.640.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 orang cleaning service, 3 orang tenaga administrasi dan tersedianya peralatan serta bahan kebersihan kantor.

Hasil (Outcome) :

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor serta terlaksananya tugas-tugas perkantoran dengan baik.

c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.4.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

3 unit komputer, 7 Laptop dan 6 unit printer terawat dengan baik



Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.13.890.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%, Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat tulis kantor, berupa : (kertas HVS 70 gr, kertas HVS 70 gr warna merah, kertas HVS A4 70 gr) sebanyak 109 rim, hektek besar dan hektek kecil sebanyak 24 buah, isi hektek besar, isi hektek kecil, paper clips dan clips jumbo sebanyak 48 dos, Catridge printer canon 40 buah, tinta printer 12 botol dan alat tulis kantor lainnya.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.830.000,-dengan realisasi keuangan dan fisik 100%, capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan, berupa : penjilidan laporan dan LAKIP sebanyak 10 buah, biaya penjilidan DPA - SKPD sebanyak 12 buah, DPPA 12 buah dan foto copy sebanyak 34.000 lembar

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

f) Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.24.330.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman untuk 12 kali rapat untuk 30 orang

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.

g) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.35.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.33.650.000,- (95.5%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.600.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 3 buah lemari arsip besar, 8 buah lemari arsip kecil, 1 unit Pesawat TV Samsung 32", 1 unit Pesawat Faximile dan 2 meja kerja.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.



h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.154.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp.147.255.000,- atau 95,3% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.7.245.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

4 orang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Agama RI di Jakarta, 1 orang melakukan koordinasi ke Sekretariat Negara terkait hewan kurban bantuan Presiden, 3 orang melakukan koordinasi ke BAZNAS Pusat di Jakarta.

Hasil (Outcome) :

Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat

i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.235.513.000,- dengan realisasi keuangan Rp.196.319.000,- atau 83,4% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.39.194.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

34 orang dari Biro Kesra mengikuti pertemuan sinkronisasi Program dan Kegiatan kesejahteraan masyarakat di 11 kabupaten/kota

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya efektivitas dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dalam urusan kedinasan bagi pejabat, yang di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.47.984.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%, Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 orang pengemudi kendaraan dinas; 1.920 liter bahan bakar; jasa service 4 x; pelumas 4 tube dan pajak kendaraan dinas.

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

C. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin dalam rangka memperingati Hari-hari besar keagamaan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



a) Penyediaan Protein Hewani bagi Masyarakat Miskin

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.674.752.000,-dengan realisasi keuangan dan fisik 100%.Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 40 ekor Sapi, 86 ekor kambing, dengan perincian: 29 ekor sapi, 49 ekor kambing di alokasikan di kota Ambon, 10 ekor sapi 30 ekor kambing dialokasikan di Maluku Tengah, 1 ekor sapi, 7 ekor kambing di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2 ekor kambing.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin

D. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, kualitas dan kuantitas pendidikan bagi masyarakat, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.823.383.000,- dengan realisasi keuangan Rp.2.018.383.000,- atau 71,5% dan fisik 75 %, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.805.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Beasiswa bagi 34 orang (S1), 15 orang (S2), 10 orang (S3) dan Biaya Penelitian bagi 3 orang (S1), 5 orang (S2) dan 4 orang (S3)

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kreatifitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang berdaya saing.

b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pendidikan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.235.164.000,- dengan realisasi keuangan Rp.180.228.000,- atau 76,6% dan fisik 85 %, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.54.936.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan hasil monev bantuan pengembangan SDM pada Perguruan Tinggi di 3 Provinsi dan 2 Kab/Kota (Makassar-Sulsel; Jakarta-DKI; Jogjakarta-DIY; Kabpaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara)

Hasil (Outcome) :

Sebagai bahan evaluasi perbaikan pengelolaan dana hibah bantuan Pemerintah bagi Perguruan Tinggi.

E. Program Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



a) Keikutsertaan Provinsi Maluku dalam Pameran Pembangunan HARGANAS

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.453.302.000,- dengan realisasi keuangan Rp.412.855.500,- atau 91,1% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 40.446.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

- 30 orang Aparatur Sipil Negara Biro Kesra bersama Tim Penggerak PKK melakukan koordinasi ke 11 Kab/Kota terkait produk unggulan kab/Kota yang akan di pameran pada Stand Pameran HARGANAS; 3 orang aparaturnya Biro Kesra bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku melakukan koordinasi dan konsultasi ke BKKBN Pusat di Jakarta terkait pelaksanaan HARGANAS.
- Tersedianya stand pameran dan produk-produk unggulan dari Provinsi Maluku pada kegiatan HARGANAS di Manado-Sulawesi Utara.

Hasil (Outcome) :

Tereksposnya hasil pembangunan Maluku di bidang KB di tingkat Nasional serta Konsistensi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang kesejahteraan masyarakat

F. Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Safari Keagamaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.383.140.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.333.107.000,- atau 86,9 % dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.033.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Safari keagamaan ketiga Kabupaten/Kota (Maluku Tenggara Barat ; Kepulauan Aru dan Kota Ambon di Masjid Al Fatah, Kediaman Wagub; Lantamal IX, Kapolda, Lanud, Pangdam XVI Pattimura dan Perayaan Natal bersama di Cristiani Centre)

Hasil (Outcome) :

Memantapkan hubungan antar umat beragama, sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat.

G. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai di seluruh Maluku, yang diimplementasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Peran Tokoh Agama

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.7.718.066.000,- dengan realisasi keuangan Rp.7.498.032.900,- atau 97,1% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.220.033.100,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:



Keluaran (Output) :

210 tokoh agama yang berasal dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha melakukan perjalanan Ibadah Umroh, Ibadah ke Yerusalem dan India.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan para tokoh agama.

b) Peningkatan Jiwa Nasionalisme pada Masyarakat

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.801.292.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.761.689.800,- atau 95,1% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.39.602.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Peringatan kegiatan HUT Martha Cristina Tjihahu; HUT Pattimura dan HUT Provinsi Maluku.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya semangat nasionalisme dan patriotisme bagi masyarakat

H. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan hak-hak pekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diimplementasikan melalui kegiatan :

a) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.114.561.000,- dengan realisasi keuangan Rp.113.661.000,- atau 99,2% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.900.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

60 orang di dua kab/Kota (Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat) mengikuti Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya perlindungan dan hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat, yang diimplementasikan melalui kegiatan :

a) Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.148.233.000,- dengan realisasi keuangan Rp.146.934.950,- atau 99,1% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.298.050,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

60 orang di dua kab/Kota (Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat) mengikuti kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat.



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 (tahun n-2) Dan Capaian Renstra SKPD

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Alokasi anggaran belanja langsung pada Biro Kesejahteraan rakyat untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp.4.161.197.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.984.591.000,- (96 %) dan sisa anggaran sebesar Rp.176.606.000,-. Anggaran belanja ini direalisasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa layanan dan sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor serta peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.9.852.000,- dengan realisasi keuangan Rp.9.787.752,- atau 99,3% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.65.000,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa 1 saluran komunikasi (Indiehome)

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.116.020.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 orang cleaning service, 3 orang tenaga administrasi dan tersedianya peralatan serta bahan kebersihan kantor.

Hasil (Outcome) :

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor serta terlaksananya tugas-tugas perkantoran dengan baik.

c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

3 unit komputer, 7 Laptop dan 6 unit printer terawat dengan baik

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran



d) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.7.083.500,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%, Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat tulis kantor, berupa : (kertas HVS 70 gr, kertas HVS 70 gr warna merah, kertas HVS A4 70 gr) sebanyak 53 rim, heker besar dan heker kecil sebanyak 12 buah, isi heker besar, isi heker kecil, paper clips dan clips jumbo sebanyak 24 dos, Catridge printer canon 20 buah, tinta printer 6 botol dan alat tulis kantor lainnya.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.8.251.500,- dengan realisasi keuangan Rp.8.251.400,- atau 99,9% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.100,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, berupa : penjilidan laporan dan LAKIP sebanyak 10 buah, biaya penjilidan DPA - SKPD sebanyak 10 buah, DPPA 10 buah dan foto copy sebanyak 22.290 lembar

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

f) Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.22.344.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman untuk 12 kali rapat untuk 30 orang

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.

g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.136.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp.124.500.000,- atau 91% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.11.900.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

1 orang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Agama RI di Jakarta, 1 orang melakukan koordinasi ke Sekretariat Negara terkait hewan kurban bantuan Presiden, 2 orang menghadiri Lounching MTQN di Pontianak, 1 orang menghadiri Rakornas BAZNAS di Solo, 1 orang menghadiri Evaluasi BAZNAS Tahun Anggaran 2019 di BAZNAS Pusat di Jakarta.

Hasil (Outcome) :

Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat

h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.99.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp.93.198.000,- atau 93,7% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.6.302.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

15 orang dari Biro Kesra mengikuti pertemuan sinkronisasi Program dan Kegiatan kesejahteraan masyarakat di 11 kabupaten/kota

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya efektivitas dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan



B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dalam urusan kedinasan bagi pejabat, yang di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.49.856.000,- dengan realisasi keuangan Rp.49.361.500,- atau 99% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.494.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 orang pengemudi kendaraan dinas; 1.920 liter bahan bakar; jasa service 4 x; pelumas 4 tube dan pajak kendaraan dinas.

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 2 printer, 1 Laptop dan 2 meja kerja ½ Biro

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

C. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin dalam rangka memperingati Hari-hari besar keagamaan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Protein Hewani bagi Masyarakat Miskin

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.545.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp.539.200.000,- atau 98,9% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.900.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 32 ekor Sapi, 48 ekor kambing, dengan perincian: 27 ekor sapi, 30 ekor kambing di alokasikan di kota Ambon, 5 ekor sapi 16 ekor kambing dialokasikan di Maluku Tengah, 2 ekor kambing di Kabupaten Seram Bagian Barat

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin

D. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, kualitas dan kuantitas pendidikan bagi masyarakat, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.632.140.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Beasiswa bagi 21 orang (S1), 3 orang (S3)

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kreatifitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang berdaya saing.

b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pendidikan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.217.860.000,- dengan realisasi keuangan Rp.206.247.000,- atau 94,7% dan fisik 100 %, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.11.613.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :



Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan hasil monev bantuan pengembangan SDM pada Perguruan Tinggi di 5 PT dan 2 Kab/Kota (Makassar-Sulsel; Jakarta-DKI; Jogjakarta-DIY; Bandung-Jawa Barat; Malang-Jawa Timur; Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara)

Hasil (Outcome) :

Sebagai bahan evaluasi perbaikan pemberian beasiswa dan pengelolaan dana hibah bantuan Pemerintah bagi Perguruan Tinggi.

E. Program Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Keikutsertaan Provinsi Maluku dalam Pameran Pembangunan HARGANAS

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.335.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.328.600.000,- atau 92,6% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.400.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

- 15 orang Aparatur Sipil Negara Biro Kesra bersama Tim Penggerak PKK menghadiri hari puncak HARGANAS dan Pameran HARGANAS di Banjarbaru Kalimantan Selatan; 3 orang aparaturnya Biro Kesra Setda Maluku melakukan koordinasi dan konsultasi ke BKKBN Pusat di Jakarta terkait pelaksanaan HARGANAS.
- Tersedianya stand pameran dan produk-produk unggulan dari Provinsi Maluku pada kegiatan HARGANAS di Banjarbaru- Kalimantan Selatan.

Hasil (Outcome) :

Tereksposnya hasil pembangunan Maluku di bidang KB di tingkat Nasional serta Konsistensi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang kesejahteraan masyarakat.

F. Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.500.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.497.260.500,- atau 99,5% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.2.739.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Safari keagamaan ke lima Kabupaten/Kota (**Kota Ambon:** Masjid Al Fattah, Masjid An-Nur, Kediaman Wakil Gubernur; **Maluku Tengah:** Masjid Hila, Masjid Hita dan Pengungsian Waai; **Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Aru**)

Hasil (Outcome) :

Memantapkan hubungan antar umat beragama, sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat.

b) Pembinaan Toleransi Kerukunan Beragama

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.245.438.500,- atau 98,2% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.561.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :



Dialog lintas tokoh agama dan masyarakat di 5 Kabupaten/kota (Kota Ambon, Maluku Tengah dan Kota Tual)

Hasil (Outcome) :

Menjaring aspirasi/masukan/pendapat para tokoh agama dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Maluku damai.

G. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai di seluruh Maluku, yang diimplementasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Peran Tokoh Agama

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.178.003.000,- atau 98,9% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.997.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

5 tokoh agama Islam melaksanakan Ibadah Umroh di Tanah Suci Mekkah.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan para tokoh agama.

b) Peningkatan Jiwa Nasionalisme pada Masyarakat

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.655.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.539.000.000,- atau 82,3% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.116.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Peringatan kegiatan HUT Martha Cristina Tijahahu; HUT Pattimura dan HUT Provinsi Maluku.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya semangat nasionalisme dan patriotisme bagi masyarakat

H. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan hak-hak pekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diimplementasikan melalui kegiatan :

a) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.137.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.136.200.000,- atau 99% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.800.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

60 orang di dua kab/Kota (Buru dan Seram Bagian Timur) mengikuti Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya perlindungan dan hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat, yang diimplementasikan melalui kegiatan :

a) Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.142.166.600,- atau 94,8% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.7.833.400,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

60 orang di dua kab/Kota (Buru dan Seram Bagian Timur) mengikuti kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku mempunyai tugas: “Membantu Asisten Kesejahteraan Sosial Dan Administrasi Umum dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pelayanan administrative di bidang kesejahteraan rakyat”, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kesejahteraan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan Ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Keagamaan, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 2. Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Sosial Kemasyarakatan, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Sosial dan Kesehatan;
 2. Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.



- d. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Pendidikan;
 2. Sub Bagian Kependudukan;
 3. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

C. Permasalahan Terkait Kinerja SKPD

Permasalahan yang dihadapi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Kompleksnya tuntutan masyarakat, sehingga sulit untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan, sementara masyarakat menuntut agar semua kebutuhan mereka dapat dipenuhi dalam waktu singkat;
2. Data base terkait kesejahteraan rakyat yang tidak akurat;
3. Masalah koordinasi, sampai dengan saat ini masih merupakan kendala yang belum terpecahkan, terutama koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sejenis.

D. Isu-isu strategis Biro Kesejahteraan Rakyat

Isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku antara lain:

1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang kesejahteraan rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2. Masih terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD, sehingga terjadi ketimpangan dalam penanganan masalah/program dan kegiatan.

E. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Beberapa pendekatan dalam penyusunan RKPD yang perlu mendapat perhatian antara lain: pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down dan bottom-up.

a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrembang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
- b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah masa kini



- c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD
- d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan
- e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)
- f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja
- g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
- h) Tolok ukur dan target kinerja keluaran
- i) Tolok ukur dan target kinerja hasil
- j) Pagu indikatif program dan kegiatan
- k) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya
- l) Kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD
- b) Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan
- c) Transparansi akuntabilitas dalam proses perencanaan
- d) Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif
- e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan , seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan dan prioritas program

c. Pendekatan Politis

Pendekatan politisi bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan , Strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- b) Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- c) Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD



- d) Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- e) Pembahasan terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

d. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan Bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih
- b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD

e. Pendekatan Top-down

Pendekatan Top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD
- b) Penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem
- e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku di sebutkan bahwa "Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pelayanan administrative di bidang kesejahteraan rakyat".

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin jeli terhadap kesejahteraan, maka Biro kesejahteraan Rakyat berusaha untuk menyiapkan dan menyusun rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2021 adalah untuk mengkomunikasikan kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran rencana kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2021 adalah untuk mencapai hasil dari program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

3.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2021

1. Program Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 1.2. Program Kesejahteraan Rakyat;

2. Kegiatan Tahun 2021

- 2.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 2.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 2.3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- 2.4. Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- 2.5. Fasilitasi Keprotokolan;
- 2.6. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
- 2.7. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;



2.8. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;

3. Sub Kegiatan Tahun 2021

- 3.1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 3.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3.3. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 3.4. Penyediaan Bahan logistic kantor
 - 3.5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - 3.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 3.7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3.8. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 3.9. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas
 - 3.10. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - 3.11. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara
 - 3.12. Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual
 - 3.13. Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual
 - 3.14. Fasilitasi,koordinasi,sinkronisasi,evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan
 - 3.15. Fasilitasi,koordinasi,sinkronisasi,evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan
 - 3.16. Fasilitasi,koordinasi,sinkronisasi,evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang social (Umroh, Safari Keagamaan)
 - 3.17. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
 - 3.18. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.,evaluasi dan capaian kinerja kebijakan
4. Lokasi program dan kegiatan pada Kota Ambon, Kabupaten/Kota dan Luar Provinsi.
 5. Pagu Anggaran untuk menunjang program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 sebesar Rp.119.428.526.716,- (Seratus Sembilan belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah).



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 memuat program dan kegiatan, dengan harapan agar rencana kerja ini dapat memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi peningkatan dan pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian rencana kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2020 agar dapat dipergunakan seperlunya.

